



EDITORIAL:

Isu-isu Internasional: Kebahasaan Kebijakan Luar Negeri, Keamanan Manusia, Kelompok Lobi, Diaspora, Disabilitas, dan Globalisasi

Sebagai sebuah jurnal akademik, *Intermestic: Journal of International Studies* senantiasa akan menjadi wahana wacana dan forum diskusi bagi para cendikia (*scholar*) mengenai ragam isu internasional dan intermestik yang perlu diangkat dan diperhatikan khalayak pembaca. Pada Volume 1, No. 2, Mei 2017, meskipun belum mengkhususkan pada sebuah tema tertentu, namun artikel-artikel yang kami persembahkan di sini memiliki keistimewaan dalam mengangkat isu kajian berdimensi internasional yang kerap terpinggirkan untuk dibahas. Antara lain adalah isu mengenai psikologis kebahasaan dalam kebijakan luar negeri, keamanan manusia, kelompok lobi, hubungan interkultural diaspora, penyandang disabilitas, serta globalisasi. Untuk semua ini kami mengucapkan terimakasih banyak kepada para kontributor artikel.

Artikel pertama adalah “*Appraisal Analysis in Media Conference Between The Government of Indonesia and Australia Towards Bilateral Relations Normalization*” ditulis oleh Rosaria Mita Amalia dan Fauzia Zahira Munirul Hakim. Kebijakan luar negeri yang disampaikan melalui tulisan atau pidato memiliki kekuatan tersendiri untuk mengesankan sesuatu maupun *appraisal* yang diinginkan kepada pihak target (Hansen, Lene. 2012: 94-109). Di dalam rangkaian tata bahasanya terkandung struktur pola pikir dan dimensi psikologis tertentu yang terencana (Flockhart, 2012:87). Untuk

menghadapi normalisasi hubungan bilateral yang rapuh antar negara, kehati-hatian seorang negarawan dalam memberikan pernyataan formal kenegaraan sangat disyaratkan.

Fenomena kebahasaan dalam kebijakan luar negeri di atas yang dibahas dalam artikel ini bermaksud mengenali dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Objek kajiannya adalah teks-teks pernyataan resmi Pemerintah Indonesia (diwakili oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa) dan Pemerintah Australia (diwakili oleh Julie Bishop) pada suatu konferensi pers pasca skandal penyadapan yang dilakukan oleh Pemerintahan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013. Pisau analisis *appraisal* yang digunakan di sini bertujuan untuk menunjukkan nilai-nilai bahasa *evaluative* yang dipakai oleh pelibat wacana (*appraiser*), yaitu Marty Natalegawa dan Julie Bishop. Jenis *appraisal* yang digunakan, adalah: *affect*, *judgment*, dan *appreciation*. Ketiga jenis *appraisal* itu mencakup penilaian positif maupun negatif yang berkaitan dengan perasaan, perilaku, dan penghargaan terhadap sesuatu yang dibicarakan.

Melalui telaah *appraisal* di dalam bingkai kajian analisis wacana, kedua penulis mengidentifikasi dan menunjukkan bahwa tidak ditemukan *appraisal* negatif yang diusulkan oleh perwakilan dari kedua negara. Baik dari pernyataan-pernyataan Marty Natalegawa maupun dari Julie Bishop melalui media konferensi terindikasikan adanya kesepakatan untuk melanjutkan dan memulihkan hubungan bilateral kedua negara yang hampir rusak.

Artikel kedua berkaitan dengan persoalan keamanan non-tradisional, yaitu kemanan manusia yang berkembang dalam Kajian Keamanan Internasional. Rizal A. Hidayat menulisnya dengan judul “*Keamanan Manusia Dalam Perspektif Studi keamanan kritis: Terkait Perang Intra-Negara*”. Fokus Kajian Keamanan dalam Studi Hubungan Internasional secara tradisional didominasi oleh pemikiran Realisme yang secara dominan hirauannya adalah keamanan negara. Ketika kemudian mendapatkan kritikan dari para penantangannya, antara lain dari para pemikir Teori Kritis (*Critical Theory*) dalam Hubungan Internasional, Studi Keamanan meresponsnya dengan beberapa perluasan kajian dalam hal ontologi dan epistemologi terkait keamanan.

Tulisan Rizal A.Hidayat ini, merupakan penalaran kritis studi kepustakaan. Dimulai dari persoalan keamanan manusia yang dikaji melalui pendekatan studi

keamanan kritis sebagai sebuah kritik ontologis dan epistemologis mengenai negara sebagai obyek referen keamanan. Kritik tersebut, dikatakan, bermuara dari pengembangan lebih luas pendekatan studi keamanan *Copenhagen School* yang dipelopori oleh Buzan, Weaver dan De Wilde (1998). Terutama melalui analisis sektor keamanan dan konsep sekuritisasinya. Kedua hal inilah yang kemudian direspon oleh kelompok pendekatan Studi Keamanan Kritis dalam *Aberystwyth/Wales School* dan *Toronto School* yang mengajukan tiga klaim pertanyaan ontologis seputar konsep keamanan yang sebenarnya dan nyata. Ketiga klaim tersebut mencakup: *what is real (of security)?, what is knowledge (of security)?, what (security) is to be done?*. Kemudian, melalui relevansi dan analoginya dalam konflik/perang *intra-state*, klaim akan konsep keamanan kritis menemukan momentumnya. Momentum yang dimaksud adalah memperkuat keterlihatan ancaman keamanan internasional/global yang sebenarnya dan nyata terhadap keamanan kehidupan manusia adalah manusia.

Hubungan Interkultural masyarakat Diaspora terepresentasi pada artikel ketiga yaitu, "*Dinamika Diaspora Subkultur Cina Di Singkawang*" yang ditulis oleh Jafar Fikri Alkadrie, Gorby Faisal Hanifa, dan Annisa Chantika Irawan. Hubungan interkultural antara migran yang kemudian menjadi masyarakat diaspora dengan masyarakat pribumi mempunyai dinamikanya tersendiri. Dinamika yang terjadi dalam kurun waktu mengikuti genealogi rezim kekuasaan pemerintah setempat, dan berpengaruh terhadap tata kehidupan di bidang sosial, ekonomi dan politik.

Fenomena dinamika interkultural dalam artikel ini terjadi pada masyarakat diaspora etnis Cina dengan masyarakat etnik-etnik Pribumi di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Diaspora etnis Cina Singkawang, memiliki identitas subkultur yang unik dan khas sebagai hasil akulturasi antara budaya asal dari Cina dengan budaya lokal Singkawang, Kalimantan Barat. Di sini contohnya ditunjukkan melalui upacara ritual *Cap Go Meh*.

Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif dan konsep subkultur, dinamika interkultural di Kota Singkawang dilihat melalui kajian genealogi rezim kekuasaan, dari Orde Lama, Orde Baru dan Orde Refomasi. Hasil yang didapat memperlihatkan bahwa pada masa rezim Orde Lama etnis Cina di Singkawang memiliki keleluasaan dalam mengekspresikan budaya asal dan keyakinan mereka. Namun perubahan sebaliknya terjadi pada masa rezim Orde Baru yang meminggirkan

mereka, khususnya yang berada di Kota Singkawang selama dua dekade. Setelah era Reformasi pintu kebebasan dibuka kembali bagi masyarakat diaspora etnik Cina ini, bahkan lambat laun memberi pengaruh yang signifikan terhadap tata kehidupan di bidang sosial, ekonomi, politik di Kota Singkawang.

Artikel keempat mewakili isu kepentingan non-negara, yaitu kelompok kepentingan sekaligus penekan dalam pembuatan kebijakan suatu negara ditulis oleh Iqbal Ramadhan dengan judul “*Lobi Israel Dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Ke Timur Tengah*”. Kebijakan luar negeri, seperti yang dikatakan oleh Henry Kissinger, selalu dipengaruhi oleh situasi dan komposisi kekuatan politik domestik. Peran kelompok kepentingan dalam negeri dapat memainkan peranan kuat dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara. Untuk mencapai kepentingannya, kelompok penekan dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki dapat melakukan lobi-lobi secara langsung atau tidak langsung kepada para pembuat kebijakan negara.

Iqbal Ramadhan membahas peran salah satu kelompok kepentingan di Amerika Serikat pada masa pemerintahan George W. Bush, yaitu kelompok lobi pro Israel (AIPAC, ADL, dan ZOA) terkait kebijakan-kebijakan negara Amerika Serikat (AS). Ketiga kelompok lobi ini sangat hirau dan memiliki kepentingan tersendiri terhadap setiap kebijakan luar negeri AS ke Timur Tengah, khususnya yang bersinggungan dengan masalah Israel. Kebijakan AS Presiden Bush *War on Terrorism* yang didukung oleh kelompok lobi ini telah berhasil memveto hasil Resolusi DK PBB 1701 terkait konflik Israel-Hisbullah, intervensi pemilu demokratis di Palestina, serta *deterrence* pada kebijakan nuklir Iran.

Metode yang digunakan penulis adalah kualitatif dan analisis studi kasus melalui pendekatan konsep kebijakan luar negeri dari Lovell dan teori lobi pluralis. Hasil dan simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa kekuatan finansial dan kekuatan politik yang dimiliki oleh kelompok lobi ini mampu membuat mereka berpengaruh secara langsung (*direct lobby*) dan tidak langsung (*indirect lobby*). Pengaruh mereka dikenali pada perumusan kebijakan luar negeri di tataran lembaga eksekutif dan legislatif AS. Menurut penulis, pengaruh mereka tersebut dikategorikan sebagai *input* atau sumber utama akses informasi dalam kebijakan luar negeri berupa *interest*, dari level kelompok ke level nasional.

Kajian mengenai kelompok yang terpinggirkan terdapat dalam artikel kelima. Meilanny Budiarti Santoso dan Nurliana Cipta Apsari menulis mengenai “*Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas*”. Semangat liberalisasi dan demokratisasi di seluruh dunia pasca Perang Dingin bertumpu pada penguatan sendi-sendi dasar hak asasi manusia. Seiring dengan itu, paradigma mengenai disabilitas bagi sebagian manusia yang juga memiliki hak asasinya secara berangsur-angsur mengalami pergeseran. Pergeseran mulai dari penyebutan, permasalahan yang dihadapi sampai pada pendekatan dan penanganan serta berbagai bentuk pelayanan bagi para penyandang disabilitas.

Pergeseran paradigma ini oleh Meilany dan Nurliana dilihat dari perkembangan perhatian kalangan internasional terhadap keberadaan dan hak manusia para peyandang disabilitas. Perhatian internasional tercermin dari kemunculan beberapa deklarasi yang berkaitan dengan isu disabilitas dikemukakan oleh organisasi internasional, antara lain, WHO, ICIDH dan ICF. Sementara dari kalangan akademik internasional pergeseran perhatian mengenai para penyandang disabilitas ditandai dengan kemunculan gagasan-gagasan yang terkait dalam bentuk model, seperti model tradisional, model individual-model medis, serta model sosial. Pada gilirannya kemudian bagaimana perhatian Pemerintah Indonesia dalam menyikapi permasalahan para penyandang disabilitas ini. Meskipun terdapat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, namun manfaatnya masih belum dirasakan oleh para penyandang disabilitas di Indonesia. Pertanyaan tak terjawab adalah apakah Indonesia mengadopsi begitu saja setiap perkembangan paradigma maupun wacana yang beredar di kalangan internasional yang berkaitan dengan panyandang disabilias ini. Selain itu juga, apakah Pemerintah Indonesia memiliki paradigma tersendiri yang memuat sisi kelokalan terkait dengan lingkungan sosial-budaya, norma dan adat istiadat tersendiri mengenai perlakuan yang pantas terhadap penyandang disabilitas. Berikutnya yaitu apakah paradigma yang berdimensi intermestik yang coba dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia?

Permasalahan globalisasi pada perihal kosmopolitanisme dan multikulturalisme merupakan kajian lain yang diangkat dalam volume ini. Melalui judul “*Globalisasi Sebagai Katalis Kosmopolitanisme dan Multikulturalisme (Studi Kasus Resistance Cina Terhadap Kosmopolitanisme)*”, Hardi Alunaza dan Moh. Sarifudin menjelaskan bagaimana kosmopolitan dan multikulturalisme berhadapan dengan resistensi Cina atas

arus budaya yang mengalir bersama globalisasi. Dalam analisis yang dilakukan Alunza dan Sarifudin, penyangkalan terhadap Globalisasi yang dilakukan oleh Cina melalui kebijakan “*The Great Firewall*” menjadi penghalang utama dalam terbangunnya pemahaman kosmopolitanisme dan multikulturalisme di Cina. Dengan keterbatasan yang ada, bentuk kosmopolitan yang hadir di Cina hanya sebatas kosmopolitanisme pasar dan kosmopolitanisme federasi internasional. Hasil ini merupakan kajian mendalam peneliti melalui metode studi pustaka dari sumber data sekunder dengan menggunakan konsep Kosmopolitanisme dan Multikulturalisme.

Penutup dari terbitan jurnal nomor ini merupakan *Research Notes* yang disusun oleh Taufik Hidayat, Yan Mulyana, Adityo Sudagung dan Affabile Rifawan berdasarkan penelitian mereka yang berjudul “*Posyandu Sebagai Soft Power Indonesia Dalam Diplomasi Kesehatan Global*” (2015). Keamanan kesehatan merupakan hal yang fundamental bagi setiap manusia di dunia, namun baru mendapatkan perhatian global sejak *Oslo Declaration 2017* yang diprakarsai oleh beberapa negara, termasuk Indonesia. Berkenaan dengan ini Indonesia berpotensi untuk mengajukan model penanganan kesehatan, khususnya bagi anak dan ibu, yang dinamakan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) ke tingkat internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya revitalisasi Posyandu sebagai salah satu cara Indonesia untuk meningkatkan *smart power* dalam melakukan diplomasi kesehatan global. Dengan menggunakan Metode kualitatif, serta konsep kesehatan global, Posyandu, *public-private partnership*, dan *soft power*, penelitian ini mendapatkan bahwa Indonesia telah melakukan banyak diplomasi kesehatan di arena internasional baik pada tingkat negara maupun tingkat individu. Perbaikan model Posyandu yang merupakan temuan khas Indonesia, bersama pihak swasta lokal dan asing dapat menjadi salah satu *soft power* Indonesia dalam melakukan diplomasi di bidang kesehatan global

Bersamaan dengan publikasi jurnal edisi kali ini, kami menghaturkan ucapan terimakasih tak terhingga atas kesediaan tiga penelaah sejawat atau mitra bestari (*peer reviewer*) baru, yaitu: Prof. Dr. H. Andrik Purwasito, DEA. dari Universitas Sebelas Maret, Indonesia; Assoc. Prof. Dr. Ahmad Bashawir bin Hj. Abdul Ghani, University of Northern Malaysia, Malaysia; dan Dra. Baiq L.S.W. Wardhani, M.A., Ph.D., Universitas Airlangga, Indonesia. Demikian pula kepada para mitra bestari yang sudah

hadir pada nomor terdahulu, yaitu Prof. Drs. Yanyan Mochammad Yani, M.A.IR., Ph.D., Universitas Padjadjaran, Indonesia; Prof. Dr. Obsatar Sinaga, S.IP., M.Si., Universitas Padjadjaran, Indonesia; Dra. Sukawarsini Djelantik, M.A., Ph. D., Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia; HE. Dr. Dino Patti Djalal, Foreign Policy Community of Indonesia, Indonesia; dan Dr. R. Widya Setiabudi, S.IP., S.Si., M.T., M.Si. (Han), Universitas Padjadjaran, Indonesia. Dengan kepakaran masing-masing dalam ragam ilmu dan konsentrasi khususnya akan memperkuat kredibilitas dan kualitas serta posisi dan arah jurnal ini.

Debut publikasi e-jurnal *Intermestic: Journal of International Studies* dapat disimak dari kepercayaan yang datang pasca penerbitan perdana. Kepercayaan tidak hanya dari kesediaan mitra bestari lintas universitas dalam dan luar negeri, masuknya artikel para kontributor, jumlah para pengunjung situs, namun juga dari institusi-institusi dalam jaring (daring) indeksasi dan repositori internasional dan domestik yang memberikan ruang dan akses bagi Jurnal ini. Institusi-institusi tersebut: *Crossref*, *Base*, *Google Scholar* dan Unpad Kandaga. Selain itu, setiap artikel kini memiliki identitas objek digital yang unik dan persisten (DOI) yang diperlukan sebagai kualifikasi reputasi maupun sarana verifikasi.

Hormat Kami,

Arry Bainus dan Junita Budi Rachman

Pimpinan Redaksi dan Wakil Pimpinan Redaksi